

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgen. Aktivitas ini telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan kalau ditarik mundur lebih jauh lagi, kita akan dapatkan bahwa pendidikan telah mulai berproses semenjak Allah swt. menciptakan manusia pertama Adam di sorga dimana Allah telah mengajarkan kepada Beliau semua nama-nama yang oleh para malaikat belum dikenal sama sekali (QS Al Baqarah: 31-33). Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan ini semenjak itulah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. Bahkan pendidikan adalah suatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia (Buan, 2008: 2).

Upaya pendidikan dalam menjadikan manusia semakin berkembang. Perkembangan keindividualan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai suatu potensi yang akan berkembang jika disertai dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Melalui pendidikan pula

manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri (Ismail, 2010: 3).

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah "subyek" dari pendidikan. Karena merupakan subyek dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu pendidikan yang baik. Melalui pendidikan manusia menyadari hakikat dan martabatnya didalam relasinya tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Itu berarti, pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan (Suryaman, 2010: 1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 mengatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai implemetasi dari UUD tersebut pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Kesowo, 2003: 1).

Fungsi adanya UU Sisdiknas ini adalah sebagai pemberi kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Perubahan mendasar yang dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Rahmawati, 2010: 2).

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang bahkan akan terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, disamping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Hal ini sesuai

dengan tujuan Pendidikan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam rangka untuk memperluas wawasan dan kualitas hidupnya, sehingga setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan (Ro'illah, 2009: 1).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kita selama ini dikelola dalam suatu sistem birokratik yang sentralistik, yang dipandang berbagai pihak sebagai salah satu penyebab keterpurukan mutu pendidikan di tanah air. Karena sistem birokrasi selalu menempatkan kewenangan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak sekolah yang terkungkung oleh kekuasaan birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang sangat birokratis. Merekalah yang paling berperan sebagai pengambil keputusan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk "juklak" dan "juknis" yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan objektif di masing-masing sekolah, atau bahkan mereka kebingungan dalam lingkaran yang seharusnya mereka tinggalkan (Harsono, 2007: 73).

Permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum, diidentifikasi dalam empat krisis pokok yaitu menyangkut masalah: kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Berbagai indikator kuantitatif dikemukakan berkenaan dengan keempat masalah di atas, antara lain analisis komparatif yang

membandingkan situasi pendidikan antara negara di kawasan Asia. Keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar, dan multidimensional, sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya. Permasalahan ini terjadi pada pendidikan secara umum di Indonesia, termasuk pendidikan Islam yang dinilai justru lebih besar problematikanya (Sanaky, 2008: 4).

Kualitas pendidikan Indonesia, berdasarkan beberapa hasil survei diantaranya Survei *World Competitiveness Year Book* dari tahun 1997 sampai tahun 2007 pendidikan Indonesia berada dalam urutan sebagai berikut, pada tahun 1997 dari 49 negara yang diteliti Indonesia berada di urutan 39. Pada tahun 1999, dari 47 negara yang disurvei Indonesia berada pada urutan 46. Tahun 2002 dari 49 negara Indonesia berada pada urutan 47 dan pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan yang ke 53. Jelas sudah dari survei yang dilakukan *World Competitiveness Year Book* dari tahun 1997 – 2007 kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun. Sementara hasil penelitian UNDP tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76) dan Philipina (77) (Tanjung, 2008: 1).

Demikian pula dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di bawah Malaysia. Sebagaimana dilaporkan *United Nation Development Program* (UNDP) beberapa waktu lalu, indeks pembangunan manusia (IPM) sangat rendah dan berada di urutan 214. IPM Indonesia hanya 0,617 dan masuk kategori sedang. Itu artinya di atas kategori

'rendah' atau belum mencapai kategori 'bagus'. Indonesia masih menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Di tingkat ASEAN, posisi IPM Indonesia masih berada di bawah Malaysia menempati peringkat 61 dengan angka indeks 0,761. Sementara IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura menempati peringkat 26 dengan angka indeks 0,866m yang disusul posisi Brunei menempati peringkat 33 dengan angka indeks 0,838 (Amran, 2011: 1).

Salah satu upaya pemerintahan untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia seperti tersebut di atas, adalah mengembangkan sistem pendidikan kejuruan (SMK). Melalui pendidikan kejuruan diharapkan mampu menciptakan sumberdaya manusia yang siap bekerja. Untuk memaksimalkan peranan SMK, pemerintah menyusun program sertifikasi. Sertifikasi merupakan program yang memberikan pendidikan dan latihan pada siswa untuk memperdalam keterampilannya sesuai dengan bidang yang diminati. Bagi siswa-siswi SMK yang ingin mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat, mereka harus mengikuti beberapa ketentuan seperti mengikuti pelatihan, praktik dan uji kompetensi. Adanya sertifikasi tersebut diharapkan lulusan SMK memiliki standar kompetensi seperti yang telah ditentukan, melalui uji kompetensi siswa SMK memiliki keunggulan kompetitif di dalam pasar kerja (Bayu, 2009: 3).

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pesertanya memasuki dunia kerja atau lebih mampu bekerja pada bidang pekerjaan tertentu (*earning a living*). Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan

yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian salah satu kata kunci dalam pendidikan kejuruan adalah relevansi, yang dapat diterjemahkan sebagai kesesuaian bekal yang dipelajari dengan tuntutan dunia kerja. Kesesuaian dalam kaitan itu harus dimaknai jenis maupun kualitasnya. Artinya apa yang dipelajari siswa harus sesuai jenisnya maupun tingkatannya dengan lapangan kerja yang akan dimasuki lulusan. SMK merupakan salah satu jenis pendidikan kejuruan yang tentunya terikat oleh paradigma tersebut di atas (Depdiknas, 2001: 6).

Konsekuensi dari paradigma pengembangan SMK tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan dunia kerja. Karena secara prinsip SMK merupakan lembaga pendidikan yang diarahkan pada penyerapan lulusan dalam dunia usaha maupun dunia industri, dengan demikian dalam melaksanakan pendidikan SMK harus terikat erat dengan dunia kerja, dengan menerapkan prinsip *demand driven*. Adanya prinsip tersebut diharapkan pelaksanaan pendidikan di SMK benar-benar sesuai dengan permintaan dunia kerja. Prinsip *demand driven* (ketrampilan 2020) yang kini diikuti oleh SMK merupakan konsekuensi logis pemikiran tersebut, sehingga perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata (Muhardiansyah, 2010: 15).

Program pendidikan (termasuk SMK) dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan oleh sebab adanya *time gap* cukup lama antara saat pendidikan dirancang dengan munculnya lulusan, apalagi lulusannya memasuki dunia kerja. Sementara itu perkembangan teknologi yang demikian cepat menyebabkan

terjadinya perubahan pola kerja yang juga cepat. Persoalan lain yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dewasa ini terutama bila dikaitkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai *vocational education*, maka persoalan yang dihadapi akan semakin pelik dan kompleks terutama bila mengacu konsep pendidikan kejuruan itu sendiri. Untuk itu pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan (Hamalik, 2004: 24).

Program kejuruan pada sekolah-sekolah menengah umumnya mencakup bidang pelayanan (*area service*) dalam spektrum yang luas, akan tetapi program-program sekolah kejuruan sekarang harus dapat menyediakan program yang lebih baik daripada sekolah kejuruan maupun sekolah-sekolah khusus. Program-program yang ada, dan yang direncanakan untuk masa depan tanpa memandang jenis sekolah, harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama secara cermat tentang kecenderungan (*trend*) dalam masyarakat di masa yang akan datang.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh SMK adalah program keahlian teknik permesinan. Program Keahlian Teknik Permesinan merupakan program keahlian yang bergerak dalam bidang produksi, dengan mesin bubut, mesin frais, dan mesin skrap sebagai peralatan utama dalam pelaksanaan praktik. Pada program keahlian secara khusus bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten untuk:

Bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang Teknik Permesinan atau memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang Teknik Permesinan (Rahmadi, 2010: 1).

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembelajaran teknik permesinan siswa tidak hanya diberikan teori, tetapi siswa lebih banyak melakukan praktik di laboratorium dan melakukan praktek kerja lapangan. Proses pembelajaran melalui praktikum di laboratorium yang dilakukan oleh siswa merupakan perwujudan dari suatu teori dalam bentuk kerja nyata, atau melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu teori tertentu. Di sekolah, praktikum dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang memberikan latihan kerja bagi subjek didik. Melalui praktikum, subjek didik akan memperoleh pengalaman dalam bekerja serta dapat melihat hubungan antara teori dan empirik.

Kegiatan pembelajaran praktik pada program keahlian teknik permesinan akan memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dalam teori. Secara umum aspek-aspek yang diperhatikan dalam kegiatan praktik adalah: tahapan persiapan/pemahaman tujuan praktik, metode praktik, analisis temuan-temuan praktik serta evaluasi hasil praktik. Tahapan-tahapan tersebut menjadi acuan siswa dalam melakukan praktikum pada suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu dilaksanakan sistem blok dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu berbagai peralatan praktik yang harus dikuasai peserta didik program keahlian teknik permesinan antara lain: mesin

bubut, mesin frais, mesin scraf, mesin gerinda, mesin bor, alat-alat pengelasan, mesin CNS, dan berbagai peralatan kerja bangku, yang kesemuanya harus dapat digunakan untuk menunjang ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

Semua peralatan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut harus disusun dengan baik dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja dan kenyamanan belajar. Berdasarkan standar sarana dan prasarana pembelajaran setidaknya pada ruang praktik program keahlian teknik permesinan dapat difungsikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran: pekerjaan logam dasar, pengukuran dan pengujian logam, membubut lurus, bertingkat, tirus, ulir luar dan dalam, memfrais lurus, bertingkat, roda gigi, menggerinda-alat, dan pengepasan/pemasangan komponen dengan luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Permesinan adalah 288 (Muslikh, 2008: 105).

Dari uraian di atas, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar lulusan SMK Negeri 2 Sragen dapat terserap di pasar kerja, pengelolaan tersebut meliputi kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran, setting kelas dalam pembelajaran, dan penggunaan alat peraga dalam penelitian yang berjudul: Pengelolaan Pembelajaran Permesinan di SMK Negeri 2 Sragen.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan pembelajaran permesinan?, yang terbagi dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran permesinan di SMK Negeri 2 Sragen?
2. Bagaimana karakteristik penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Permesinan di SMK Negeri 2 Sragen?
3. Bagaimana karakteristik setting kelas dalam pembelajaran Permesinan di SMK Negeri 2 Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dan sub fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran Permesinan di SMK Negeri 2 Sragen.
2. Mendeskripsikan karakteristik penggunaan alat peraga dalam pembelajaran permesinan di SMK Negeri 2 Sragen.
3. Mendeskripsikan karakteristik setting kelas dalam pembelajaran Permesinan di SMK Negeri 2 Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan dalam proses pembelajaran khususnya tentang pola pembelajaran dan kesiapan kerja siswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas, sebagai masukan dalam rangka mengembangkan kurikulum sekolah kejuruan yang dapat membekali siswa dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri.
- b. Bagi pihak sekolah, sebagai masukan informasi mengenai pentingnya pembelajaran yang efektif dalam mendukung kesiapan kerja siswa.
- c. Bagi *stakeholders* pendidikan, sebagai bahan kaji untuk rujukan pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

E. Daftar Istilah

1. Pembelajaran Permesinan adalah suatu proses hubungan mengajar dan belajar antara peserta didik dan guru dalam mata pelajaran produktif pada program keahlian teknik permesinan.
2. Pengelolaan Pembelajaran adalah proses pembelajaran dalam mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan
3. Penggunaan Alat Peraga adalah alat untuk membantu pengajar menyampaikan pengetahuan dan mengalihkan keterampilan.